

Agus Arif Rakhman, M.M., CPSp.
Hernaning Rangga Dhyta Utama, S.K.M., MKM., CPSp., CCMS.

PROCUREMENT BY DESIGN

Perencanaan Pengadaan
sebagai Arsitektur Keputusan,
Tata Kelola, dan Perlindungan Hukum



PROCUREMENT BY

DESIGN

Perencanaan Pengadaan sebagai
Arsitektur Keputusan, Tata Kelola, dan
Perlindungan Hukum

Agus Arif Rakhman, M.M., CPSP.
Hernaning Rangga Dhyta Utama, S.K.M., MKM., CPSP., CCMS.



PENERBIT KBM INDONESIA

adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku-buku penulis di tanah air Indonesia, serta menjadi media *sharing* proses penerbitan buku.

PROCUREMENT BY DESIGN
Perencanaan Pengadaan sebagai
Arsitektur Keputusan, Tata Kelola, dan
Perlindungan Hukum

*Copyright @ 2026 By Agus Arif Rakhman, M.M., CPSP. dan
Hernaning Rangga Dhyta Utama, S.K.M., MKM., CPSP., CCMS.*

All right reserved

Penulis

Agus Arif Rakhman, M.M., CPSP.
Hernaning Rangga Dhyta Utama, S.K.M., MKM., CPSP., CCMS.

Desain Sampul

Aswan Kreatif

Tata Letak

Husnud Diniyah

Editor

Merry Nia Irawati, M.Pd.
Background isi buku di ambil dari [https://www. freepik. com/](https://www.freepik.com/)

Official

Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor)

Penerbit KBM Indonesia

Anggota IKAPI/No. IKAPI 279/JTI/2021

081357517526 (Tlpn/WA)

Website

<https://penerbitkbm.com>
[www. penerbitbukumurah. com](http://www.penerbitbukumurah.com)

Email

naskah@penerbitkbm.com

Distributor

[https://penerbitkbm. com/toko-buku/](https://penerbitkbm.com/toko-buku/)

Youtube

Penerbit KBM Sastrabook

Instagram

@penerbit. kbmindonesia
@penerbitbukujogja

ISBN: 978-634-278-104-3

Cetakan ke-1, Januari 2026
15,5 x 23 cm, xii + 238 halaman

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit
Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di DJKI-Kemenkumham
dan isi buku dilindungi undang-undang.

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa seizin penerbit karena beresiko sengketa hukum

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- i. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100. 000. 000 (seratus juta rupiah).
- ii. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500. 000. 000,00 (lima ratus juta rupiah).
- iii. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1. 000. 000. 000,00 (satu miliar rupiah).
- iv. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4. 000. 000. 000,00 (empat miliar rupiah).

PROCUREMENT BY DESIGN:

Perencanaan Pengadaan sebagai Arsitektur Keputusan, Tata Kelola, dan Perlindungan Hukum

Penulis: Agus Arif Rakhman, M.M., CPSP. dan
Hernaning Rangga Dyta Utama, SKM., MKM.

ARSITEKTUR KEPUTUSAN



Kerangka Berpikir
Strategis
Analisis Kebutuhan
& Pasar
Pemilihan Metode
Tepat
Optimasi Nilai &
Kualitas

TATA KELOLA (GOVERNANCE)



Transparansi &
Akuntabilitas
Proses
Terstandarisasi
Manajemen Risiko
Integritas & Etika

PERLINDUNGAN HUKUM



Kepatuhan Regulasi
Mitigasi Sengketa
Kontrak yang Kuat
Keamanan Hukum
bagi Pelaku

PERENCANAAN PENGADAAN

- 1 Identifikasi Kebutuhan
- 2 Analisis Pasar
- 3 Pemaketan Pengadaan
- 4 Penyusunan Spesifikasi & HPS
- 5 Pengumuman Pengadaan

FITUR & MANFAAT UNGGULAN



- QR Code Template Dokumen Terupdate
- Integrasi AI & Blockchain
- Peningkatan Efisiensi (up to 40%)
- Pengurangan Risiko (up to 60%)
- Penghematan Anggaran (15-25%)



CEKLIST DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN

Persiapan Menuju Value for Money

Nama Paket: [.....]

Satuan Kerja: [.....]

Tahun Anggaran:
[.....]



TAHAP A: INISIASI KEBUTUHAN

- ☒ 1. Formulir Identifikasi Kebutuhan Pengguna Akhir
- ☒ 2. Rekapitulasi Identifikasi Kebutuhan Pengguna Akhir



TAHAP B: PERENCANAAN TEKNIS

- ☒ 3. Dokumen Analisis Pasar (*inc: RFI, Spend Analysis*) PPK
- ☒ 4. Spesifikasi Teknis / KAK PPK
- ☒ 5. RAB / Perkiraan Harga PPK



TAHAP C: FINALISASI & PEMAKETAN

- ☒ 6. Form Perencanaan Pengadaan (Dokumen Induk) PPK
- ☒ 7. Form Penetapan Konsolidasi

Lampiran Wajib:

- ☐ 8a. KK Prioritas PDN (Wajib)
- ☐ 8b. KK Verifikasi Impor (Kondisional)



TAHAP D: REVIU & PENETAPAN

- ☒ 9. Kertas Kerja Reviu Dokumen Tim Reviu UKPBJ
- ☒ 10. Dokumen Perencanaan Pengadaan Final PA/KPA

SIAP PENGUMUMAN SIRUP

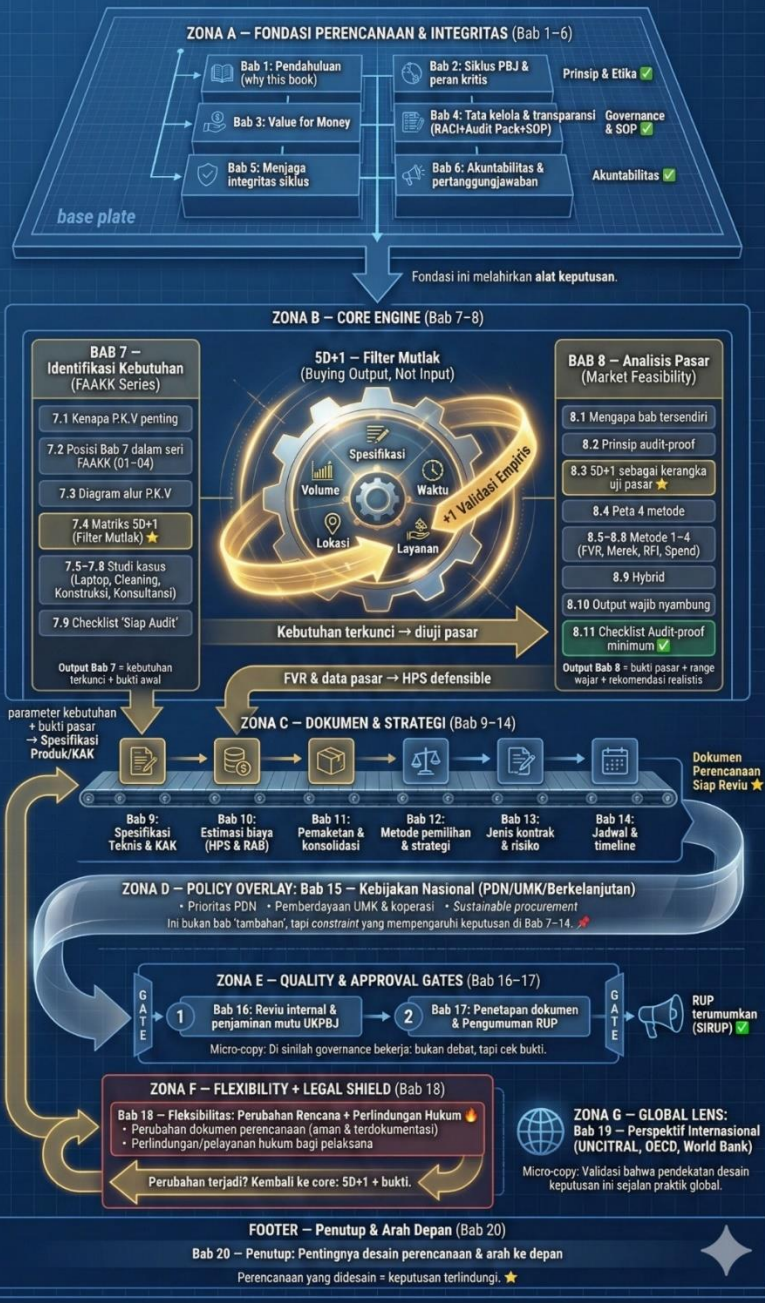
Sistem Informasi Perencanaan Pengadaan

PETA KONSEP ISI BUKU (Bab 1–20)

Procurement by Design: Perencanaan Pengadaan sebagai Arsitektur Keputusan, Tata Kelola, dan Perlindungan Hukum

Agus Arif Rakhman, M.M., CPSp. & Hernaning Rangga Dyta Utama, SKM, MKM

Dari prinsip → alat keputusan → dokumen → reviu → penetapan → RUP (audit-proof) ★



KATA PENGANTAR

PENGADAAN barang/jasa pemerintah bukan sekadar urusan belanja—ia adalah cara negara mengubah anggaran menjadi manfaat nyata: layanan publik yang lebih baik, infrastruktur yang berfungsi, dan perlindungan sosial yang sampai ke rakyat. Namun, pengalaman lapangan menunjukkan satu pola yang berulang: ketika pengadaan gagal, akar masalahnya sering kali bukan pada proses pemilihan penyedia, melainkan jauh lebih awal—pada desain perencanaan yang kabur, tergesa, atau tidak akuntabel. Di titik inilah buku ini berdiri: menempatkan perencanaan sebagai “mesin utama” yang menentukan kualitas keputusan sejak awal.

Buku ***Procurement by Design: Perencanaan Pengadaan sebagai Arsitektur Keputusan, Tata Kelola, dan Perlindungan Hukum*** ini ditulis oleh **Agus Arif Rakhman, M.M., CPSp.** dan **Hernaning Rangga Dyta Utama, SKM, MKM.** Kami menyusunnya karena ada kebutuhan yang sangat praktis di lapangan: bagaimana PPK dan seluruh ekosistem pengadaan (UKPBJ, pengguna, perencana, auditor internal, hingga pimpinan) dapat bekerja dengan cara yang lebih modern, lebih tenang, dan lebih terlindungi secara hukum—tanpa kehilangan ketegasan pada integritas. Kita hidup di era transparansi pasar, e-katalog, jejak digital, dan analitik data. Karena itu, pendekatan pengadaan yang masih terjebak pada “labirin aritmatika” dan logika input semata semakin rentan: menyita energi, membuka ruang perdebatan pada hal kecil, dan mengabaikan tujuan utama—membeli **output** dan **hasil**.

Melalui buku ini, kami mengajak pembaca mengubah sudut pandang: perencanaan pengadaan bukan tumpukan formulir, melainkan **arsitektur keputusan**. Di dalamnya kita mengunci kebutuhan berbasis

fungsi, melakukan riset pasar yang waras, menyusun spesifikasi yang netral namun tegas, membangun HPS/RAB berbasis output, merancang paket dan konsolidasi yang seimbang, menentukan cara pengadaan (swakelola atau penyedia) dengan uji kelayakan yang dapat dibuktikan, memilih metode pemilihan dan strategi penawaran yang tepat, menetapkan jenis kontrak sebagai pembagian risiko, dan menyusun timeline sebagai tulang punggung eksekusi. Semua itu kemudian diuji melalui reviu internal sebagai quality assurance, disahkan oleh PA/KPA, dan diumumkan melalui RUP sebagai wujud transparansi. Rangkaian ini bukan sekadar patuh regulasi—ia adalah cara paling masuk akal untuk meminimalkan kegagalan dan memaksimalkan **Value for Money**.

Buku ini sengaja ditulis dengan gaya **playbook**: naratif, sistematis, dan kaya instrumen yang bisa langsung dipakai. Untuk memastikan dampaknya tidak berhenti di halaman buku, kami melengkapinya dengan **QR Code** yang mengarah ke **folder Google Drive** berisi **template, formulir kerja, matriks keputusan, dan infografis** yang dijelaskan di buku ini. Artinya, pembaca tidak hanya memahami konsep, tetapi juga bisa langsung mengadopsi perangkat kerja yang siap pakai untuk implementasi: mulai dari lembar uji kelayakan keputusan, kerangka justifikasi, hingga format dokumen yang lebih “audit-proof”. Kami ingin buku ini menghasilkan perubahan yang nyata—bukan sekadar menambah referensi.

Di tengah kompleksitas regulasi dan dinamika lapangan, satu pesan penting perlu ditegaskan: **pengadaan yang profesional membutuhkan ruang diskresi yang bertanggung jawab**. Perencanaan dan perubahan perencanaan sering terjadi karena jarak waktu antara penyusunan dan eksekusi, perubahan kebutuhan pengguna, atau dinamika pasar. Selama keputusan diambil dengan itikad baik, berbasis data, terdokumentasi, dan tanpa *mens rea*—tidak ada gratifikasi, suap, atau rekayasa—maka aparat pengadaan seharusnya dilindungi oleh hukum, bukan ditakuti. Budaya “kriminalisasi diskresi” adalah racun bagi inovasi, kecepatan layanan publik, dan keberanian mengambil keputusan rasional.

Selain untuk ekosistem pengadaan pemerintah, buku ini juga relevan bagi **setiap entitas yang membutuhkan strategi perencanaan pengadaan**—mulai dari **BUMN/BUMD, BLU/BLUD**, perguruan tinggi, lembaga riset, rumah sakit, organisasi nirlaba, hingga korporasi yang mengelola belanja secara akuntabel. Prinsip “Procurement by Design” pada dasarnya adalah ilmu merancang keputusan belanja yang **berbasis kebutuhan (output), berbasis pasar (market intelligence), berbasis risiko (risk allocation), dan berbasis bukti (audit trail)**. Jadi, meski kerangka regulasi dapat berbeda, logika intinya tetap sama: bagaimana mengubah anggaran menjadi hasil yang terukur, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan—tanpa mengorbankan integritas, transparansi, dan kualitas layanan.

Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih kepada para praktisi pengadaan di seluruh Indonesia—PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja, UKPBJ, APIP, dan semua pihak yang setiap hari menjaga marwah uang rakyat dengan kerja senyap yang sering tidak terlihat. Semoga buku ini menjadi teman seperjalanan: membantu Anda bekerja lebih presisi, lebih cepat, lebih aman, dan tetap berorientasi pada manfaat publik. Semoga QR Code dan perangkat yang kami siapkan juga benar-benar menjadi “jembatan” dari teori ke praktik: dari **blueprint** menuju **dampak nyata**.

Penulis

Agus Arif Rakhman, M.M., CPSp.
Hernaning Rangga Dyta Utama, SKM, MKM.

QR CODE BUKU PROCUREMENT BY DESIGN

Dengan mengakses QR Code ini, Anda menyetujui bahwa:

- **Penggunaan Eksklusif:** QR Code ini mengandung materi yang hanya boleh diakses dan digunakan oleh pembeli buku ini. Hak akses ini bersifat pribadi dan tidak dapat dialihkan.
- **Larangan Penyebarluasan:** Anda dilarang untuk menyebarluaskan, membagikan, atau mengizinkan pihak lain mengakses isi QR Code ini tanpa izin tertulis dari penerbit atau penulis buku.
- **File pada QR Code ini** hanya diizinkan untuk di download, dilarang untuk di edit isinya pada link, silahkan anda download terlebih dahulu kemudian silahkan dimanfaatkan sesuai dengan petunjuk penggunaannya
- **Sanksi Hukum:** Pelanggaran atas ketentuan ini dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan perubahannya serta peraturan hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Ini termasuk, namun tidak terbatas pada, sanksi pidana dan/atau denda atas pelanggaran hak cipta dan hak terkait lainnya.
- **Pertanggungjawaban:** Anda bertanggung jawab penuh atas segala bentuk kerugian yang timbul akibat penyalahgunaan QR Code ini, baik yang dilakukan oleh Anda maupun pihak ketiga yang memperoleh akses melalui Anda.
- Dengan menggunakan QR Code ini, Anda menyatakan pemahaman dan persetujuan atas semua ketentuan yang telah dijelaskan.



SCAN ME

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
QR CODE BUKU PROCUREMENT BY DESIGN	v
DAFTAR ISI	vii
01. PENDAHULUAN	1
Penjelasan Latar Belakang Judul Buku.....	2
02. SIKLUS PENGADAAN BARANG/JASA DAN PERAN KRITIS PERENCANAAN	8
03. PRINSIP VALUE FOR MONEY DALAM PENGADAAN	13
04. TATA KELOLA YANG BAIK DAN TRANSPARANSI DALAM PERENCANAAN PENGADAAN	18
RACI Matrix untuk SOP Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa	22
Audit Pack Table RACI + Output + Evidence Minimum pada SOP Perencanaan Pengadaan.....	24
Standar Operasional Prosedur (SOP) Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa	27
05. MENJAGA INTEGRITAS DALAM SIKLUS PENGADAAN	35
06. AKUNTABILITAS DAN PERTANGGUNGJAWABAN DALAM PERENCANAAN	39
07. IDENTIFIKASI KEBUTUHAN: FONDASI PERENCANAAN PENGADAAN	43
Kenapa P.K.V itu Penting (Bukan Sekadar Teori)	44
Posisi Bab 7 dalam Seri FAAKK (biar tidak salah pakai “varian”)	45
Diagram Alur P.K.V (format operasional, bukan poster).....	46
Matriks 5D+1 — Filter Mutlak Identifikasi Kebutuhan (Buying Output, Not Input).....	48
Studi Kasus Utama (FAAKK-01): Pengadaan Laptop (50 unit).....	55

Mini-Case 1 (FAAKK-02): Cleaning Service Gedung Pelayanan Publik.....	60
Mini-Case 2 (FAAKK-04): Pekerjaan Konstruksi (Contoh Gedung 2 Lantai Akses Sempit).....	62
Mini-Case Konsultasi (FAAKK-03): Kajian Kewajaran Harga & Strategi Pengadaan 1 Tahun.....	64
Checklist “Siap Audit” (Wajib Ada di Akhir FAAKK)	68
Penutup Bab: “Kalau Anda Bisa Menunjuk Alur, Anda Menang Audit”	70
08. ANALISIS PASAR: MENJAJAKI KEMAMPUAN PASAR MEMENUHI KEBUTUHAN	71
Mengapa Analisis Pasar Menjadi Bab Tersendiri (dan Bukan “Lampiran Kecil”)	74
Prinsip Dasar Analisis Pasar yang Audit-Proof 	76
Matriks 5D+1 — Kerangka Uji Kemampuan Pasar (Market Feasibility Filter)	76
Peta 4 Metode Dokumen Analisis Pasar (Opsional, Bisa Digabung) 	84
Metode 1 — Formulir Referensi & Kewajaran Harga (Konsep & Sistematika)	85
Metode 2 — Formulir Analisis Pasar Berbasis Merek (Konsep & Sistematika)	87
Metode 3 — Formulir Request for Information (RFI) (Konsep & Sistematika)	88
Metode 4 — Formulir Spend Analysis (Konsep & Sistematika).....	90
Cara Menggabungkan Metode (Hybrid) — Praktis dan Realistis	92
Output Bab 8 yang Wajib “Nyambung” ke Dokumen Perencanaan	93
Checklist “Audit-Proof Minimum” untuk Bab 8 	94
Penutup Bab 8: Analisis Pasar = Jembatan dari “Konsep” ke “Keputusan”	95
09. MENYUSUN SPESIFIKASI TEKNIS DAN KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)	96
Mengapa Bab 9 Krusial dalam “Procurement by Design”	97
Prinsip Desain: Spesifikasi Produk/KAK Harus “Tertelusur”	97

Bagian A — Spesifikasi Produk (Barang, Jasa Lainnya, Output-Based).....	98
Bagian B — Spesifikasi Teknis Pekerjaan Konstruksi (Blueprint Operasional).....	102
BAGIAN C — KAK JASA KONSULTANSI (26 Klausul Berbasis Value for Money).....	104
Checklist “Audit-Proof Minimum” untuk Bab 9 	107
10. ESTIMASI BIAYA: PENYUSUNAN HPS DAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)	108
Pendahuluan: Mengapa Paradigma Kita Harus Runtuh?	109
Landasan Akademis – Harga Adalah Produk Pasar, Bukan Kalkulator.....	109
Strategi Timeline – Memahami RAB Vs HPS	111
Sistematika Utama RAB/HPS Berbasis Output	112
Implementasi Tematik (Contoh Kasus).....	114
Matriks 5d+1 — Filter Mutlak Identifikasi Kebutuhan	118
Analisis Smart Procurement (VFM Revisited).....	121
Penutup: Pesan Untuk PPK Modern	121
11. PEMAKETAN DAN KONSOLIDASI PENGADAAN: STRATEGI MENGEMAS KEBUTUHAN.....	122
Memahami Konsep Dasar: Pemaketan vs. Konsolidasi	124
6 Faktor Kunci Pertimbangan Pemaketan bagi PPK.....	124
Arsitektur Konsolidasi dalam Labirin Pengadaan: Menjahit Efisiensi melalui Strategi Pemaketan	126
Korelasi Bab 11 dengan bagian sekitar	135
12. MEMILIH METODE & MERANCANG STRATEGI PENAWARAN YANG TEPAT.....	138
Pendahuluan: Titik Krusial dalam Perencanaan	139
Hierarki Metode Pemilihan di Indonesia	149
Merancang Strategi Penawaran yang Komprehensif	154
Studi Kasus: Berpikir Kreatif untuk Nilai yang Lebih Baik.....	156
Kesimpulan: FPP sebagai Peta Jalan yang Akuntabel.....	157

13. MENENTUKAN JENIS KONTRAK DAN PEMBAGIAN RISIKO DALAM PERENCANAAN.....	158
Filosofi Jenis Kontrak sebagai Instrumen Mitigasi	159
Matriks Pengambilan Keputusan Jenis Kontrak.....	160
Dinamika Pembagian Risiko dalam Konstruksi dan Jasa.....	161
Studi Kasus: Transformasi Kontrak Jasa Kebersihan (Cleaning Service).....	161
Integrasi dalam Dokumen Perencanaan	162
Paradigma "Keluaran" (Output): Mengapa Kita Tidak Membeli Semen, Tapi Membeli Dinding? 📌	162
Tabel "Output & Evidence Minimum" per Jenis Kontrak (Audit-Proof)	165
"STOP RULE Kontrak" (Filter Kejam tapi Menyelamatkan)	168
🔒 Penutup Mini (1 Paragraf) untuk Mengunci Gaya Bab 13.....	170
14. MENYUSUN JADWAL DAN TIMELINE PENGADAAN	171
Mengapa Jadwal adalah "Decision Shield" (Tameng Keputusan)..	173
Definisi yang Harus Jelas: "Butuh Kapan" vs "Kontrak Kapan"	174
"Backward Planning" sebagai Metode Wajib (Cara Menyusun Timeline).....	176
Checklist Faktor yang Wajib Dipertimbangkan PPK.....	177
Template Jadwal dalam Dokumen Perencanaan.....	178
Studi Kasus 1 — Renovasi 4 Bulan yang Hampir Jebol Tahun Anggaran.....	179
Studi Kasus 2 — "Panik Oktober" karena RUP Telat	180
"Stop Rule" Jadwal (Filter Kejam tapi Menyelamatkan) 🛡️	180
Penutup Bab 14: Timeline adalah Bagian dari Perlindungan Hukum.....	180
15. KEBIJAKAN NASIONAL: PRIORITAS PRODUK DALAM NEGERI, PEMBERDAYAAN UMK, DAN PENGADAAN BERKELANJUTAN .	182
Prioritas Produk Dalam Negeri (PDN/P3DN): Kebijakan yang Harus "Terkunci" Sejak Spesifikasi.....	184
Pemberdayaan UMK/Koperasi: Bukan "Bagi-Bagi Paket", tapi Desain Kompetisi yang Sehat	186
Pengadaan Berkelanjutan: Memindahkan Fokus dari Harga ke Total Cost + Total Impact	187

Tabel “Titik Tanam Kebijakan” agar Nyambung ke Semua Dokumen (Praktis untuk Pembaca).....	189
Penutup Bab 15: Tiga Kebijakan, Satu Kesimpulan	189
16. REVIU INTERNAL DAN PENJAMINAN MUTU OLEH UKPBJ .	191
Posisi Reviu UKPBJ dalam SOP Perencanaan Pengadaan (Agar Tidak Salah Tempat) 	193
Mengapa Reviu ini Penting (Bukan Sekadar Formalitas).....	194
Maker–Checker Charter: Hubungan sehat PPK dan UKPBJ	194
Paket Dokumen yang Diserahkan PPK ke Tim Reviu (DPP Package)	195
Dua Tahap Reviu: Gate 0 dan Gate 1–8.....	196
Sistematika “Kertas Kerja Reviu DPP” (Format Operasional).....	199
Standar Status Rekomendasi: “Lulus itu Seperti Apa?”	201
Dua Pengunci Mutu: Rule of Consistency & Compliance Lock	202
“Stop Rule” Reviu (Filter Kejam tapi Menyelamatkan).....	203
Studi Kasus (Versi Ringkas, tapi Mengena).....	203
Penutup Bab: Reviu sebagai Tangga Menuju Penetapan	204
17. PENETAPAN DOKUMEN PERENCANAAN OLEH PA/KPA DAN PENGUMUMAN RUP	205
Posisi Tahap Ini dalam SOP “Procurement by Design” (Peta Alur).....	206
Penetapan Dokumen Perencanaan oleh PA/KPA: Apa yang Sebenarnya “Dikunci”	206
Pengumuman RUP: Mengubah Rencana Internal Menjadi Sinyal Publik & Sinyal Pasar	208
Mini-Case (Pola yang Sering Terjadi) — “Tender Jalan, RUP Ketinggalan”	209
Checklist Praktis “Gate Akhir” (Ringkas tapi Tajam) 	209
18. FLEKSIBILITAS: PERUBAHAN RENCANA PENGADAAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM	210
Stop Kriminalisasi Diskresi Perubahan Perencanaan: Lindungi Keputusan yang Beritikad Baik	212
Posisi Bab Ini di Peta Besar (Korelasi dengan Bab Lain) 	216
Kapan Perubahan Itu Sah dan Masuk Akal? (Trigger yang Paling Umum) 	216

Klasifikasi Perubahan: Minor vs Mayor (Ini Kunci	
"Audit-Proof") 🔥	217
"Alur Perubahan" yang Rapi: 7 Langkah Change Control	218
Stop Rule Perubahan (Filter Kejam tapi Menyelamatkan) 🛑	219
Contoh Kasus Ringkas (Supaya Kebayang)	220
Penutup: Perubahan yang "Elegan" Itu Selalu Punya Jejak	220
19. PERSPEKTIF INTERNASIONAL: STANDAR UNCITRAL, OECD,	
DAN KERANGKA BANK DUNIA DALAM PERENCANAAN	
PENGADAAN	222
UNCITRAL Model Law: "Aturan Main" Global yang Mengunci	
Transparansi & Kompetisi	223
OECD: Pengadaan sebagai Instrumen Kebijakan Publik (Bukan	
Sekadar Beli Barang)	224
Bank Dunia: PPSD dan "Fit for Purpose"—Perencanaan sebagai	
Strategi Proyek	225
Tren Terkini yang Mengikat Semuanya: Sustainability, Data, dan	
"Evidence Culture"	226
Peta Penerjemahan: Dari Standar Global ke Toolkit "Procurement by	
Design" (Ringkas, Praktis)	227
Penutup: Apa "Upgrade" yang Paling Relevan?	227
20. PENUTUP: DESAIN PERENCANAAN SEBAGAI FONDASI—DAN	
ARAH KE DEPAN	228
DAFTAR PUSTAKA	233
PROFIL PENULIS	237

DAFTAR PUSTAKA

- Republik Indonesia, "Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*," 2018.
- Republik Indonesia, "Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*," 2021.
- Republik Indonesia, "Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*," 2025. *SmartID*
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, "Peraturan Lembaga LKPP Nomor 11 Tahun 2021 tentang *Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*," 2021. *Peraturan BPK*
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, "Peraturan Lembaga LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang *Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia*," 2021.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, "Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang *Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia*," 2024.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, "Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 tentang *Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*," 2021. *PPID Bawaslu*

- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, "Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2025 tentang *Masa Transisi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*," 2025. *Scribd*
- Republik Indonesia, "Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi," 2022. *Mahkamah Agung*
- United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), *UNCITRAL Model Law on Public Procurement*, United Nations, New York, NY, USA, 2011.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *Recommendation of the Council on Public Procurement*, OECD Publishing, Paris, France, 2015.
- OECD, *Methodology for Assessing Procurement Systems (MAPS): 2018 Edition*, OECD Publishing, Paris, France, 2018.
- World Bank, *The World Bank Procurement Framework*, World Bank, Washington, DC, USA, 2016. *Dokumen Publik Bank Dunia*
- World Bank, "Revisions of the World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers: Seventh Edition," World Bank, Washington, DC, USA, 2025. *World Bank*
- World Bank, *PPSD Procurement Guidance (Project Procurement Strategy for Development)*, World Bank, Washington, DC, USA, 2024. *Dokumen Publik Bank Dunia*
- International Organization for Standardization (ISO), *ISO 20400:2017—Sustainable Procurement: Guidance*, ISO, Geneva, Switzerland, 2017.
- M. D. Varian, *Intermediate Microeconomics: A Modern Approach*, 9th ed., W. W. Norton & Company, New York, NY, USA, 2014.
- J. W. Tukey, *Exploratory Data Analysis*, Addison-Wesley, Reading, MA, USA, 1977.
- F. R. Hampel, E. M. Ronchetti, P. J. Rousseeuw, and W. A. Stahel, *Robust Statistics: The Approach Based on Influence Functions*, Wiley, New York, NY, USA, 1986.

Project Management Institute (PMI), *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)*, 7th ed., PMI, Newtown Square, PA, USA, 2021. ★

PROFIL PENULIS



Agus Arif Rakhman, M.M., CPSp.

Agus Arif Rakhman adalah Pengelola Pengadaan Ahli Madya di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Republik Indonesia, yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem pengadaan nasional. Keahliannya yang mendalam dalam bidang ini diakui melalui perannya sebagai Fasilitator Kehormatan Bidang Pengadaan

Barang/Jasa di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI.

Sebagai Probity Advisor LKPP RI, Agus memainkan peran krusial dalam memastikan integritas dan transparansi proses pengadaan di tingkat nasional. Pengalamannya yang luas mencakup penyusunan berbagai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan model dokumen pengadaan, yang telah menjadi acuan penting dalam standardisasi proses pengadaan di berbagai instansi pemerintah.

Agus juga dikenal sebagai penulis produktif dalam bidang pengadaan barang dan jasa. Buku-bukunya telah menjadi sumber referensi yang berharga bagi praktisi dan akademisi di seluruh Indonesia. Kontribusinya dalam tim penyusun peraturan LKPP semakin memperkuat perannya sebagai tokoh kunci dalam membentuk kebijakan pengadaan di tingkat nasional.

Dengan kombinasi unik antara keahlian teknis, pengalaman praktis, dan kemampuan menulis, Agus Arif Rakhman terus berdedikasi untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas dalam dunia pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Karyanya tidak hanya membentuk praktik

terbaik saat ini, tetapi juga menginspirasi generasi mendatang dari para profesional pengadaan.



Hernaning Rangga Dhyta Utama, S.K.M., MKM., CPSp., CCMS.

Hernaning Rangga Dhyta Utama atau biasa dipanggil Rangga Saat ini menduduki jabatan sebagai Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda di Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung. Selain melaksanakan tugas pokok sebagai pejabat pengadaan dan pokja pemilihan, Rangga juga mendapatkan penugasan dari LKPP RI sebagai Advisor, Mediator dan Asesor.

Sebagai Advisor, Rangga telah mendampingi beberapa proses pengadaan barang dan jasa di tingkat Kementerian ataupun Pemerintah Daerah.

Rangga juga terlibat aktif dalam organisasi Pengadaan Barang/Jasa yaitu sebagai Dewan Pengurus Nasional Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia (DPN IFPI) dan Dewan Pengurus Pusat Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (DPP IAPI).

Prestasi terakhir Rangga dalam Pengadaan Barang dan Jasa adalah Juara I Nasional Lomba Cerdas Cermat Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Virtual Expo SDM dan Kelembagaan PBJ Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh LKPP RI.

Dengan pengalamannya, Rangga selalu berusaha memberikan ilmu dan pengetahuan yang dimilikinya dalam bidang pengadaan barang dan jasa baik melalui penyampaian secara langsung atau dalam bentuk tulisan, semata-mata sebagai bentuk ikhtiar untuk pengadaan barang/jasa di Indonesia yang lebih baik.